



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2018/Periodik - 2017)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
**SUB UNIT KERJA** : SEKRETARIAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MARIA MAHARSI PRADOPOSARI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM
3. NHK : 224485

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 590.048.000**

1. Tanah Seluas 734 m2 di SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 117.440.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/60 m2 di MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 102.544.000
3. Tanah Seluas 1340 m2 di SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 214.400.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/90 m2 di SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 155.664.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 311.500.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
3. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
5. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 55.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	728.223.561
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.684.771.561
III. HUTANG	Rp.	100.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.584.771.561

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **TIDAK LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **15 Januari 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.